



Kemajemukan Indonesia menurut ajaran Gereja Protestan Maluku dalam perpekstif teologi agama-agama

Theophillia Vristya Leatemala¹, Jhony Christian Ruhulesin², Ricardo Freedom Nanuru³
Universitas Kristen Indonesia Maluku

Correspondence:

ricardonanuru632@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v9i1.605>

Article History

Submitted: Aug. 10, 2022

Reviewed: April 03, 2022

Accepted: April 27, 2023

Keywords:

Indonesian pluralism;
Maluku Protestant
Church's dogma;
pluralism in Maluku;
theology of religions;
ajaran Gereja Protestan
Maluku;
kemajemukan Indonesia;
teologi agama-agama

Copyright: ©2023, Authors.

License:



Scan this QR,
Read Online



Abstract: Plurality, including religious plurality in Indonesia, is an indisputable reality. Many conflicts based on religious pluralism still occur in Indonesia today, and all religions in Indonesia must be responsible for them. This article aims to review the religious plurality concept as the face of Indonesia in the form of the Maluku Protestant Church's dogma, as a responsibility of the Maluku Protestant Church in contributing to the development of Indonesia. This research uses a content analysis method of the Maluku Protestant Church's dogma, with the thoughts of the theology of religions as a basis. This research found 26 (twenty-six) articles about plurality, namely how the Maluku Protestant Church sees other religions. Based on the objectives of this study, it can be concluded that the belief in Tuhan Yang Maha Kuasa, who works in all the realities of Indonesia, must become a common belief of all religions, including the Maluku Protestant Church to become a common foothold in building interfaith relations towards beyond pluralism as a theological formulation of religions that is appropriate and relevant to the current context.

Abstrak: Kemajemukan termasuk kemajemukan agama di Indonesia merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Banyak konflik berteman kemajemukan agama yang masih terjadi di Indonesia hingga kini, dan semua agama di Indonesia harus bertanggungjawab atasnya. Artikel ini bertujuan untuk mengulas kemajemukan agama sebagai wajah Indonesia dalam Ajaran Gereja Protestan Maluku, sebagai wujud tanggung jawab Gereja Protestan Maluku dalam berkontribusi bagi perkembangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi terhadap Ajaran Gereja Protestan Maluku, dengan teologi agama-agama sebagai pijakannya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) artikel tentang kemajemukan yakni cara Gereja Protestan Maluku melihat agama-agama lain. Berdasarkan tujuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang adalah Tuhan yang bekerja dalam seluruh realitas Indonesia harus menjadi keyakinan bersama semua agama, termasuk Gereja Protestan Maluku. Hal ini agar menjadi pijakan bersama dalam membangun hubungan antar agama menuju *beyond pluralism* atau melampaui kemajemukan sebagai rumusan teologi agama-agama yang tepat dan relevan dengan konteks masa kini.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terbentuk sejak 17 Agustus 1945, yang menjadikan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negaranya. Sejak saat itu, Indonesia memulai langkah awalnya untuk menjadi sebuah negara baru. Kebaruan Indonesia bukan hanya pada namanya, melainkan juga pada

dasar pembentukannya dimana proses terbentuknya Indonesia berangkat dari rakyat yang di dalamnya terdapat beragam suku dan etnis, yang secara bersama menyatakan diri untuk mau menjadi satu bangsa yang baru, yakni Indonesia. Kebaruan yang lain adalah kemerdekaan Indonesia dirumuskan sebagai bentuk pekerjaan tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini dilakukan secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dengan kesadaran seperti demikian, dapat disimpulkan bahwa pada saat itu Indonesia merupakan sebuah identitas baru yang dimiliki secara bersama sebagai bangsa Indonesia.¹²

Sebagai sebuah negara, kemajemukan bukanlah sebuah hal yang baru bagi Indonesia; kemajemukan merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Pancasila yang secara sah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, lahir dan dirumuskan berdasarkan konteks Indonesia untuk mengatur kehidupan bersama sebagai suatu negara yang berlatar belakang majemuk. Secara historis, perumusan Pancasila melalui banyak perdebatan dan perubahan. Rumusan yang muncul pada 1 Juni 1945, melalui pidato terkenal Soekarno "Lahirnya Pancasila" kemudian mengalami perubahan hingga menjadi rumusan Pancasila yang kita kenal hingga saat ini, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Dari rumusan tersebut terlihat jelas bahwa Pancasila memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap realitas kemajemukan atau pluralitas di Indonesia. Hal ini tampak dalam sila pertama yang memberikan peluang untuk setiap agama yang ada di Indonesia, untuk terpanggil dalam kemerdekaan dan pemaknaan Pancasila itu sendiri. Gambaran seperti ini memperlihatkan adanya kesetaraan bagi semua agama di Indonesia dan para pemeluknya, seluruh rakyat Indonesia.⁴

Penghargaan yang tinggi terhadap kemajemukan itu justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Menurut hemat saya, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kemajemukan agama masih menjadi isu penyebab konflik. Indonesia memiliki rentetan sejarah konflik berbau agama hingga saat ini, di antaranya konflik Maluku 1999, konflik akibat penolakan pembangunan rumah ibadah, terdapat beberapa aksi penolakan terhadap komunitas agama yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Agama juga dipakai untuk mencapai kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi bagi segelintir orang⁵. Jika demikian, maka peran-peran agama di Indonesia patut dipertanyakan. Karena pada dasarnya seluruh agama di Indonesia, yang turut mengambil bagian dalam kemerdekaan Indonesia wajib untuk menjalankan perannya untuk melihat masalah ini.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 dikatakan bahwa fungsi, peran dan kedudukan agama adalah sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. Peran agama-agama termasuk Kekristenan (gereja) di Indonesia perlu diperjelas; hal ini tidak berarti juga bahwa agama menjadi satu-satunya penanggung jawab atas semua kemerosotan moral dan masalah yang terjadi di Indonesia.⁶

¹ John A Titaley, *Religiositas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme Dan Transformasi Agama-Agama* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013).

² Luh Putu Antari Swandewi, "Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia," *Jurnal Jisipol* 8, no. 1 (2019): 92–108, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3903959>.

³ Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas & Modernitas* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017).

⁴ Titaley, *Religiositas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme Dan Transformasi Agama-Agama*.

⁵ Angel Ch. Latuheru, Izak Y. M. Lattu, and Tony R. Tampake, "Pancasila Sebagai Teks Dialog Lintas Agama Dalam Perspektif Hans-Georg-Gadamer Dan Hans Kung," *Jurnal Filsafat* 30 (2020).

⁶ Wesley Ariarajah, *Alkitab & Orang-Orang Yang Berkepercayaan Lain* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017).

Sumartana mengemukakan dua alasan terkait realitas beragama dalam kemajemukan Indonesia yang belum sepenuhnya harmonis, pertama, karena teologi masih dianggap berfungsi untuk melayani gereja semata, sehingga menjadi dogmatis dan eksklusif; dan, kedua, teologi masih sangat bergantung kepada tradisi gereja induknya di masa lampau.⁷ Hal ini merupakan sebuah tantangan besar bagi teologi agama-agama karena membuat teologi di Indonesia tidak memiliki karya originalnya. Alasan ini menunjukkan bahwa setiap agama kemudian bertanggung jawab melalui teologinya terhadap masalah ini. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bagi seluruh umat beragama, termasuk umat Kristen di Indonesia yang perlu kembali mengevaluasi pokok-pokok teologinya.⁸ Gereja di Indonesia, termasuk Gereja Protestan Maluku (selanjutnya: GPM), seharusnya juga menjalankan peran-peran seperti di atas dengan baik, Menurut hemat kami, ajaran gereja harus menjadi bagian penting untuk membahas hal-hal ini, karena Ajaran Gereja yang akan menjadi sumber dari agama sebagai lembaga moral untuk membentuk moral dan karakter warganya.

Ajaran Gereja GPM menjelaskan 584 (*lima ratus delapan puluh empat*) artikel termasuk 26 (*dua puluh enam*) artikel tentang kemajemukan beragama. Sebagai gereja yang mengambil bagian dalam sejarah konflik Maluku 1999, hal itu merupakan suatu upaya yang baik untuk menjadi gereja yang menghidupi kemajemukan itu sendiri. Artinya bahwa GPM sadar akan kemajemukan dan semua masalahnya kemudian menganggap itu sebagai hal krusial yang harus ditanggapi secara serius. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemaknaan kemajemukan agama Indonesia dalam Ajaran Gereja GPM serta menentukan sebuah teologi agama-agama sebagai titik tolak yang sama. Dengan demikian, semua orang beragama di Indonesia yang juga merupakan orang Indonesia dapat berjalan secara bersama sebagai orang-orang yang menghargai Pancasila itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode analisis isi atau *content analysis*. Pendekatan kualitatif dipakai karena data yang akan disasar merupakan data tertulis serta hasil wawancara tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam penyusunan dokumen Ajaran Gereja, Gereja Protestan Maluku tersebut. Analisis isi digunakan untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka, yang dalam penelitian ini adalah dokumen ajaran Gereja Protestan Maluku, yang kemudian akan dianalisa berdasarkan sudut pandang teologi agama-agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajemukan Sebagai Wajah Indonesia dalam Ajaran Gereja GPM

Sebuah kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa selain kemiskinan, lingkungan dan masalah-masalah lain, kemajemukan agama merupakan masalah yang krusial. Berbagai masalah ini kemudian turut menjadi bagian dari Ajaran Gereja yang merupakan landasan dalam menjalankan tugas dan panggilan GPM. Pada tahun 2005, Ajaran Gereja mengalami perubahan fundamental yakni GPM secara sadar bersepakat untuk menulis langsung pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain. Dalam dokumen Ajaran Gereja GPM ditemukan tiga bagian yang menjelaskan tentang kemajemukan, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

⁷ Th Sumartana, "Teologi Dan Agama-Agama" (Salatiga, 1994).

⁸ Enggar Objantoro, "Pluralisme Agama-Agama: Tantangan Bagi Teologi Kristen," *Jurnal Simpson*, 2020.

Ajaran Gereja GPM	Artikel
Bagian II.2. Tentang: Yesus Kristus	60. Bagaimanakah pemberitaan tentang Yesus dalam kaitan dengan pluralisme agama? 61. Apakah arti ungkapan, "Banyak jalan menuju Roma" dapat dibenarkan? 62. Apakah inkarnasi Kristus merupakan jalan Allah untuk menjumpai manusia?
Bagian IV.4. Tentang: Gereja dan Agama Lain	180. Apa yang dimaksudkan dengan agama? 181. Apa itu agama lain? 182. Bagaimana sikap Gereja Protestan Maluku (GPM) terhadap agama lain? 183. Jika demikian, bagaimana GPM memahami pernyataan Yesus bahwa "Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup"? 184. Bagaimana juga dengan pernyataan "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia"? 185. Apakah itu berarti GPM tidak lagi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Penyelamat? 186. Apa dan bagaimana hubungan GPM dengan agama lain? 187. Apa itu dialog antar umat beragama ? 188. Bagaimana dialog antar umat beragama yang dilakukan? 189. Mengapa GPM bekerja sama dengan agama lain? 190. Dalam hal apa saja GPM bekerja sama dengan agama lain? 191. Bagaimana sikap gereja terhadap radikalisme dalam agama?
Bagian V.7. Tentang: Pluralisme	509. Apakah pluralisme itu? 510. Mengapa pluralisme perlu dibicarakan? 511. Adakah alasan lain lagi? 512. Bagaimana pandangan GPM terhadap pluralitas ? 513. Apakah yang dimaksudkan dengan sikap Kritis, Positif, co-eksistensi dan pro-eksistensi itu ? 514. Apakah tantangan atau masalah yang dihadapi dalam mempercakapkan dan hidup dalam realitas kemajemukan? 515. Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan matang ketika berbicara dan hidup dalam realitas kemajemukan? 516. Mengapa dasar-dasar Alkitabiah tentang pluralitas atau kemajemukan perlu diperhatikan? 517. Apa yang mempengaruhi cara pandang GPM tentang kemajemukan agama? 518. Bagaimana membangun hubungan antar agama di Maluku? 519. Apakah agenda-agenda yang bisa dilakukan dalam membangun hubungan antar agama?

*Penjelasan tiap artikel dideskripsikan pada bagian Lampiran artikel ini.

Seluruh artikel ini ditulis berdasarkan kesadaran bahwa GPM merupakan gereja yang rapuh akibat sejarah konflik kemanusiaan yang menjadikan agama sebagai tunggangannya.⁹ Terdapat 2 (*dua*) tujuan yang dapat dilihat dari penulisan artikel ini antara lain pertama, agar GPM mengalami sebuah transformasi secara internal sehingga membuka ruang untuk menghilangkan cara pandang yang konfrontatif. Kedua, GPM dapat membentuk karakter warganya dalam kaitan dengan pola interaksi dengan orang beragama lain. Melalui hal ini GPM menyatakan kontribusinya terhadap pengembangan bangsa ini.¹⁰

⁹ Wawancara terhadap E. T. Maspaitella (Ketua Sinode GPM), 19 Januari 2022 di Ambon.

¹⁰ Wawancara terhadap I.W.J. Hendriks (Narasumber Komisi Permanen Ajaran Gereja GPM), 19 September 2022 di Ambon.

Melalui penulisan artikel-artikel ini, secara tidak langsung GPM memperlihatkan dirinya sebagai gereja yang berasaskan Pancasila sehingga seluruh proses bergereja harus mengarah kepada Pancasila sebagai *the common moral*.¹¹ Dengan demikian GPM harus hadir dan melebur di tengah masyarakat dan kemajemukan itu sendiri.

Tuhan sebagai Sumber Kemajemukan

Realitas menunjukkan bahwa kehidupan beragama yang majemuk di Indonesia masih merupakan sebuah masalah. Kehidupan beragama yang majemuk di dunia termasuk di Indonesia tidak dapat menyembunyikan dirinya dari kenyataan bahwa setiap agama akan mengklaim Tuhannya masing-masing. Dengan demikian, terdapat banyak Tuhan sesuai dengan versi masing-masing kepercayaan yang ada. Bagi saya, konsekuensi logis dari hal semacam ini adalah konsep Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai konsep orang Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang seharusnya merupakan penghargaan bagi kemajemukan menjadi terbantahkan.

Hal ini sebenarnya menjadi masalah yang cukup krusial karena berkaitan dengan kehidupan yang mejemuk dalam rumah bersama, yakni Indonesia. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan keadaan yang tidak nyaman bagi sebagian orang? Bagaimana kehidupan yang dijalani dapat menciptakan sebuah kenangan manis bagi semua orang jika masih terukir kenangan-kenangan pahit atas nama agama dan kepercayaan? Serta, bagaimana Indonesia dapat menjadi rumah bersama yang nyaman bagi kemajemukannya sendiri jika demikian kenyataannya? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi sebuah kemustahilan belaka. Kenyataannya, semua orang yang tergolong dalam umat beragama akan membela dan mengklaim kebenaran agamanya masing-masing termasuk mengklaim Tuhannya sebagai yang satu-satunya pembawa keselamatan.

Ketika kenyataan itu menjadi sebuah masalah yang tak terbantahkan, maka secara tidak langsung orang-orang Indonesia akan mengalami kebingungan untuk membangun relasi yang baik dengan orang-orang berkepercayaan lain termasuk warga GPM. Terdapat Sebagian orang yang bersedia membangun relasi yang sangat baik namun tetap terdapat sekat-sekat yang tidak begitu tampak. Namun, terdapat sebagian orang yang masih merasa risih bahkan riskan jika harus membangun relasi yang baik dengan orang berkepercayaan lain, sebab mereka bertahan dengan pemahaman akan gambaran tentang Tuhan mereka masing-masing, salah satunya pemahaman bahwa "Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup."

Dengan demikian, bagian ini membawa sebuah pemahaman baru bagi perjalanan gereja juga kehidupan dalam kemajemukan agama di Indonesia ini bahwa Tuhan adalah sumber kemajemukan. Untuk sampai pada pemahaman itu, saya berusaha melihat bahwa hanya ada satu Tuhan. Dalam dinamika berIndonesia, pemahaman akan Tuhan menjadi sekat yang membatasi kemajemukan, padahal Tuhan adalah Tuhan yang sangat mencintai kemajemukan itu sendiri. Alkitab mendukung relasi yang sangat baik dengan orang berkepercayaan lain. Seluruh isi Alkitab berdiri di atas satu dasar yakni hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang lain, sehingga yang percaya akan keberadaan allah-allah lain berupa apapun akan disebut sebagai orang-orang yang murtad¹².

Alkitab yang membuka ceritanya dengan kisah penciptaan merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan Tuhan yang mencintai kemajemukan dan merupakan sumber kema-

¹¹ Susilawati, "Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika Bangsa Indonesia," *Jurnal Prajaiswara* 1, no. 1 (2022): 15–20, <https://media.neliti.com/media/publications/409858-application-of-pancasila-as-the-ethical-9ca822d5.pdf>.

¹² Ariarajah, *Alkitab & Orang-Orang Yang Berkepercayaan Lain*.

jemukan itu sendiri. Sebuah kenyataan yang harus diakui bersama adalah kisah penciptaan yang dimaksud bukanlah penciptaan gereja, agama Kristen atau bahkan penciptaan umat Israel, melainkan penciptaan kosmos dengan rumusan “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.” Itu berarti bahwa hanya ada satu Allah yang adalah Sang Pencipta, sehingga tidak ada ruang untuk Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Islam, Tuhan orang Hindu dan lain sebagainya. Tidak ada satu pun kenyataan dalam kosmos yang berada di luar kendali dan pemeliharaan Tuhan yang satu itu.¹³

Sebagian besar orang Kristen termasuk para pelayan khusus dalam pengajaran-pengajarannya selalu mengklaim bahwa seluruh pasal-pasal tentang kisah penciptaan merupakan gambaran kisah penciptaan Adam dan Hawa juga menciptakan orang-orang Kristen, sehingga Tuhan yang digambarkan adalah Tuhan orang Kristen. Padahal kisah penciptaan Adam dan Hawa dan seluruh kosmos merupakan gambaran penciptaan kehidupan dan gambaran tentang keluarga besar umat manusia itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh kumpulan Mazmur yang menggambarkan Tuhan yang satu itu: “TUHANlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya” (Mzm. 24:1) dan beberapa bagian lainnya. Mazmur tentang penciptaan kosmos ini menegaskan kembali bahwa asumsi dasar Alkitab adalah tidak ada penciptaan dan pemeliharaan yang lain selain oleh Tuhan yang disebutkan pada kisah penciptaan itu. Hal ini harus menjadi sebuah kesepakatan bersama.

Adalah benar bahwa masing-masing agama memiliki keunikan dan interpretasi berbeda terhadap realitas keagamaannya dan tidak semua agama harus sama. Namun, paling sedikit semua agama harus berangkat dari sebuah asumsi dan interpretasi dasar tentang Sang Pencipta yang sama, yang secara tidak langsung akan melibatkan seluruh realita kemajemukan itu dalam satu keutuhan. Dengan demikian, pemahaman tentang Sang Pencipta, Tuhan yang satu dan sama itu adalah Tuhan yang begitu mencintai kemajemukan. Tuhan yang itu pula yang menciptakan manusia dengan seluruh realitas kemajemukan termasuk kemajemukan agama itu dan kemudian membiarkannya menjadi bagian dari seluruh pemeliharaan-Nya. Hal itu akan memberi ruang bagi seluruh perbedaan dan hal yang esensial tentang kemanusiaan yang juga diciptakan-Nya.

Dengan demikian, kemajemukan agama memaksa setiap agama yang ada untuk melihat jauh keluar dari dirinya. Lagi-lagi, setiap agama harus melakukannya, tanpa terkecuali kekristenan yang dalam hal ini adalah gereja termasuk GPM. Menurut hemat saya, hal ini dapat terwujud dalam dogma atau ajaran yang ada. GPM melakukan sebuah perubahan besar pasca konflik 1999 melalui ajaran gerejanya yang mengangkat isu kemajemukan agama. Artinya bahwa melalui pengalaman imannya GPM sadar bahwa kemajemukan agama merupakan isu fundamental dan urgen untuk dibahas. GPM menyadari dirinya sebagai gereja yang rapuh akibat kemajemukan agama yang sempat gagal dikelola dengan baik untuk menghadirkan harmoni kehidupan, sehingga memutuskan untuk mengubah kenyataan GPM untuk menggereja dalam hubungannya dengan realitas kehidupan. Menggereja dengan realitas kehidupan berarti bahwa GPM memberikan penghargaan kepada setiap orang dalam perbedaan dan kepelbagaian.¹⁴

Dalam ajarannya, GPM meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat berkarya dalam cara yang luas termasuk menyelamatkan umat

¹³ Ariarajah.

¹⁴ Erianton Muskita, “Menggereja Pascakonflik Maluku (Penelusuran Terhadap Perspektif Eklesiologi GPM dalam Dokumen Gerejawi Dan Praksisnya Pada Periode 2005-2015)” (Universitas Kristen Indonesia Maluku, 2021).

manusia dan dunia ciptaanNya melalui agama-agama lain. Hubungan yang diusulkan adalah hubungan yang saling menghargai dan menghormati dalam segala hal termasuk menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di setiap agama. GPM juga meyakini bahwa semua agama yang ada diciptakan oleh Tuhan dan setara, sehingga GPM mengusulkan untuk membangun sikap positif terhadap kenyataan itu, dan mengusulkan dialog sebagai upaya terbaik untuk membangun hubungan dengan agama lain dalam konteks kemajemukan agama dan kemanusiaan, sebab kemanusiaan tidak dapat dikotak-kotakkan dalam alasan apapun. Dasar Alkitabiah pun turut menjadi bagian dari pembahasan pada bab ini. Kejadian 11 yang mengisahkan cerita di Babel digunakan dasar Alkitabiahnya untuk melihat kemajemukan sebagai kehendak Allah.

Hal ini merupakan sebuah langkah positif dari GPM, namun menjadi sebuah pertanyaan yang menggelisahkan, yakni “apakah pemahaman dan sikap yang ditetapkan oleh GPM dan dituang dalam ajaran gerejanya merupakan sikap yang relevan dengan realita kemajemukan di Maluku dan di Indonesia, atautkah masih terkungkung dalam fenomena sikap inklusivisme, eksklusivisme, dan pluralisme?” Menurut hemat kami, artikel tentang kemajemukan agama menunjukkan sikap inklusivisme, eksklusivisme, dan pluralisme. Sedangkan realitas kemajemukan agama di Maluku, bahkan di Indonesia, menuntut kita untuk lebih dari sekadar ketiga sikap dan pendekatan tersebut. Pluralis sering dianggap sebagai sebuah metode yang jauh lebih terbuka dari sebelumnya; padahal tidak. Kaum pluralis dinilai tidak memandang serius kemajemukan itu sendiri, sehingga kehilangan perbedaan yang tak terhindarkan oleh masing-masing agama.¹⁵ Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah pembaharuan untuk melampaui kemajemukan sebagai upaya untuk merumuskan cara berteologi agama-agama yang relevan dengan konteks kemajemukan masa kini.

Fokus bergereja tidak lagi dapat dilihat sebagai sebuah proses untuk fokus dan memperkaya diri sendiri, melainkan lebih dari pada itu realitas harus menjadi pusatnya.¹⁶ Orang-orang beriman dari setiap agama harus membuka dirinya terhadap sebuah realitas yang lebih tinggi dari pada hanya sekedar menerima keberadaan agama lain dan menganggap semuanya sama. Sederhananya, GPM tidak menjadikan hubungan dengan agama lain sebagai sebuah ajang untuk mempertentangkan ajaran dan keyakinannya, tidak juga menyembunyikannya, melainkan menjadikannya sebagai satu hal esensial yang menjadi ciri khasnya, tetapi realitas kemanusiaan yang majemuk secara utuh menjadi pijakan di dalamnya.

Secara tidak langsung, GPM telah menghidupi Pancasila sebagai payung dalam ber-Indonesia. Jika Pancasila memberikan penghargaan yang begitu tinggi pada kemajemukan terkhusus kemajemukan agama, maka seluruh realitas yang ada di dalam Indonesia itu harus juga mencerminkannya. GPM harus menjadikan dirinya sebagai sebuah wadah bagi semua orang Indonesia di Maluku yang merupakan warga gerejanya untuk tidak hanya memahami dirinya sendiri, tetapi juga dapat memahami realitas yang ada di luar dirinya yakni orang-orang dengan agama lain secara utuh sebab realitas yang lain itu juga merupakan ciptaan Tuhan yang sama dengan Tuhan yang dikisahkan dalam kisah penciptaan itu sendiri.

Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai Kebenaran Bersama

Meminjam istilah Titaley, kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah kenyataan teologis yang tidak terbantahkan. Kemerdekaan Indonesia dikatakan sebagai pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yakni Tuhan yang diakui orang Indonesia dalam rumusan sila pertama dan

¹⁵ Gerardette Philips, *Beyond Pluralism* (Yogyakarta: Interfidei, 2013).

¹⁶ Yehezkiel Siagian, “BEYOND PLURALISM Pendekatan Open Integrity Gerardette Philips Sebagai Sebuah Upaya Dialog Pluri-Religius Dalam Berteologi Interreligius Di Indonesia,” *Aradha* 1 (2021).

alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Teks proklamasi yang terdiri dari dua kalimat itu muncul setelah rencana kemerdekaan yang dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Pulau Jawa dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ternyata tidak berjalan sebagaimana dirancang. Yang dirancang BPUPKI adalah naskah yang disebut Pernyataan Indonesia Merdeka (PIM). Naskah ini pada dasarnya adalah Piagam Jakarta yang semula terdiri dari 4 alinea yang kemudian dikembangkan menjadi 9 alinea. Dalam naskah tersebut alinea 8 tertulis “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, berdasar atas segala alasan yang tersebut diatas itu, didorong oleh keinginan luhur supaya bertanggung jawab atas nasib sendiri, berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulia, terhormat, maka kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan.” Selain itu, di alinea 9 sebagai Pembukaan UUD tertulis “Ketuhanan, dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Tetapi dengan teks proklamasi, nuansa agama tertentu tidak ada dalamnya sehingga itu pernyataan yang murni rakyat Indonesia tanpa membedakan agama manusia Indonesia itu. Semua manusia Indonesia setara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika UUD disepakati, adalah UUD yang berbeda dengan rancangannya. Perbedaan itu terjadi dalam Pembukaan dan pasal 6 ayat 1. Pembukaan UUD itu pada dasarnya adalah Piagam Jakarta dengan perubahan pada alinea 3 dan alinea 4. Pada alinea 3 berubah menjadi “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Perubahan ini dikarenakan I Gusti Ketut Pudja yang mengusulkan bahwa “Atas berkat Rahmat Allah diganti dengan Tuhan saja. Tuhan Yang Maha Kuasa.”¹⁷

Sedangkan pada alinea 4 perubahannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada pasal 6 ayat 1 rancangan semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli beragama Islam” dirubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Beragama Islam sudah dihapus. Sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia itu indah dan teologis, bahkan sudah didukung dengan pengundangan UUD itu pada tanggal 10 Oktober 1945 oleh Menteri Penerangan Kabinet Syahrir I dengan SK Menpen No 1 Tahun 1945. Hal ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 Februari 1946, Menpen Kabinet Syahrir II mengundang ulang UUD tersebut lewat SK Menpen No 7 Tahun II 1946. Dalam SK yang baru itu, alinea 3 dari pembukaan berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Saafoedin Bahar, salah satu editor dari buku *Risalah* itu mengatakan “Dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 kalimat ini (alinea 3 *penulis*) masih berbunyi: ‘Atas berkat Allah yang maha kuasa’, kemungkinan besar hal ini merupakan kesalahan teknis belaka dalam suasana revolusi saat itu.” Selain itu, Panitia Lima yang dibentuk Suharto untuk berbicara tentang Pancasila mengaskan hal itu lagi dengan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena “tergesa-gesa-lupa mencoret. . . Kealpaan itu diperbaiki dalam UUD RIS dan UUD Sementara”.¹⁸

Berdasarkan kemerdekaan itu, semua orang, semua agama, bahkan semua elemen di Indonesia terpanggil untuk menghidupi pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa itu dalam seluruh perjalanan kehidupan berindonesia. Dengan perubahan seperti demikian, maka Indonesia sejatinya menjadi Indonesia yang setara bagi semua orang secara hukum dan secara teologis. Secara hukum karena semua orang bisa menjadi presiden dan memperoleh seluruh hak-

¹⁷ I Wayan Pardi, “Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan Uud 1945 Dalam Perspektif Sejarah,” *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 2, no. 2 (2019): 97, <https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15775>.

¹⁸ Pardi.

nya sebagai warga negara tanpa melihat agamanya. Sedangkan secara teologis, semua orang Indonesia di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah setara, sekalipun di hadapan Allah SWT, Tritunggal, Sang Hyang Widi Wasa, mungkin tidak. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah nama budayawi bangsa Indonesia atas Yang Ilahi, yang dalam Islam disapa dengan nama budayawi Allah swt, sedangkan yang Kristen menyapanya dengan nama budayawi Tritunggal dan yang Hindu di Bali menyapanya dengan nama Sang Hyang Widi Wasa, dan sebagainya.¹⁹ Dengan demikian Indonesia itu memberi kesetaraan kepada semua orang apa pun agamanya dan dalam kesetaraan itu bersama-sama menyapa Yang Ilahi dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam rumusan 26 (dua puluh enam) artikel yang berbicara tentang kemajemukan, GPM lebih banyak memilih istilah Allah untuk menyebut Yang Ilahi itu. Hal ini mungkin saja didasari oleh pemahaman bahwa Allah yang diyakini dan juga dirumuskan dalam Ajaran Gereja GPM yakni Allah yang Maha Kuasa yang dapat berkarya melalui agama-agama lain, untuk menjumpai juga untuk menyelamatkan umatNya.²⁰ Jika ini benar, maka pikiran Sumartana perlu menjadi pertimbangan penting, sebab baginya berbicara tentang teologi tidak hanya sekadar berbicara tentang kesibukan dari dan bagi dirinya (agama dan realitasnya) sendiri melainkan juga dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Sehingga memikirkan kaitan antara iman yang satu dengan iman yang lain dan merumuskan pertemuan iman itu dalam pemahaman teologis yang benar menjadi penting, yang pada akhirnya akan memunculkan suatu teologi agama-agama atau *theologia religionum* yang sesuai dengan realitas kemajemukan yang benar-benar dijamin oleh Indonesia melalui Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 itu sendiri. Tidak hanya itu, hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Knitter bahwa pemilihan bahasa yang digunakan untuk membahas hubungan satu agama dengan agama yang lain haruslah tepat dan berangkat dari sebuah pemahaman yang sama.

Jika demikian, maka penggunaan istilah Allah mengisyaratkan sebuah penerimaan yang terbatas hanya kepada agama Kristen dan Islam, sedangkan agama-agama lain yang tidak berakar pada pemahaman yang sama tidak tercakup di dalamnya. Hal ini dibenarkan oleh keluhan yang diterima dari salah seorang pemuka agama lain bahwa perdamaian dan kerukunan agama di Maluku hanya dibicarakan dalam bingkai agama Islam dan Kristen sebagai dua agama besar yang terlibat dalam konflik kemanusiaan 1999, padahal semua orang beragama lain di Maluku juga turut terhisap dan menjadi bagian serta merasakan dampaknya juga. Oleh karena itu, berbicara tentang gereja dan agama lain tidak dapat hanya difokuskan kepada agama Islam semata, tetapi juga semua agama.²¹ Secara tidak langsung, dengan menggunakan istilah Allah dalam rumusan ajaran tentang relasi GPM dengan orang beragama lain maka GPM sedang berusaha meniadakan beberapa agama lain, termasuk juga agama-agama suku. Dengan kata lain, GPM sedang menciptakan sebuah ruang yang akan menempatkan semua orang beragama dalam posisi yang tidak setara, dan hal itu mengarah kepada sebuah pengkhianatan kepada kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Jika berangkat dari pemahaman yang demikian maka bukan tidak mungkin jika penggunaan kata Allah dalam perumusan relasi GPM dengan agama lain perlu dipertimbangkan kembali.

¹⁹ John Hick, *God Has Many Name* (Philadelphia: Westminster Press, 1982).

²⁰ Lihat Ajaran GPM artikel 60 dan 182

²¹ Wawancara terhadap I. W. J. Hendriksz (Narasumber Komisi Permanen Ajaran Gereja GPM), 19 September 2022 di Ambon. Pengakuan Pak Hui yang mengatakan bahwa "*Ale dong bicara konflik deng damai ni cuma bicara Islam deng Kristen saja. Padahal katong samua jua rasa akang.*"

Membaca Ajaran Gereja GPM dengan penyebutan Tuhan Yang Maha Kuasa akan lebih ramah terhadap semua agama dan menempatkan mereka sebagai orang beragama yang setara. Wajah semua agama dan realitasnya akan terlihat jauh lebih bersahabat. Sejarah perumusan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sudah cukup jelas memperlihatkan hal itu. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah sebutan yang diakui secara bersama sebagai orang-orang Indonesia yang juga beragama untuk ada dalam sebuah persatuan yang utuh. Bahkan Maspaitella menyebut alinea ke-3 sebagai rumusan Pengakuan Iman Nasional Indonesia, sebab di situlah tercatat pengakuan semua agama di Indonesia yang meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan berkat Allah SWT, Tritunggal, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan semua orang termasuk warga GPM berelasi tanpa mengunggulkan agamanya sendiri karena memiliki pemahaman yang sama yakni sebagai bangsa Indonesia kita memiliki dan meyakini Tuhan yang sama, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa.²²

Pemikiran ini tidak berarti meniadakan keyakinan masing-masing agama, melainkan lebih membawa masing-masing agama untuk mempertahankan iman dan keunikannya, tetapi juga mengakui serta menghargai keunikan agama lain berdasarkan cara pandang yang berbeda yakni Indonesia sebagai kiblat yang sesungguhnya, bukan lagi konteks tempat masing-masing agama itu berasal. Artinya, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai kiblat yang wajib dijadikan pijakan. Penerimaan dan penghargaan terhadap agama lain di Maluku bahkan di Indonesia akan terwujud apabila semua orang berangkat dari pemahaman tersebut di atas dan bersedia membagikan pengalamannya dengan gambaran Yang Ilahi yang berbeda-beda itu, sebagai bukti bahwa kepelbagaian yang ada di Indonesia juga merupakan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Bahwa Tri Tunggal, Allah Swt, dan lain sebagainya tetap menjadi bagian utama dalam keyakinannya, itu tidak menjadi soal. Tetapi titik tolak yang sama di antara semua agama dan sebagai orang Indonesia harus menjadi bagian penting. Hanya dengan demikian, transformasi GPM dalam berelasi dengan orang beragama lain dapat terwujud.

Kita tidak memiliki sebuah kebenaran bersama semua agama. Kebenaran itu adalah, bahwa orang Indonesia yang beragama baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya mengakui dan meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan yang turut bekerja dalam kemerdekaan Indonesia serta akan terus bekerja dan berkarya serta memberikan rahmatNya dalam seluruh proses berindonesia. Kebenaran itu adalah bahwa seluruh orang Indonesia, apapun agamanya ada dalam sebuah kesetaraan. Transformasi yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar transformasi pada level permukaan, melainkan secara spesifik dapat terjadi pembentukan pola pikir dan karakter warganya, dan secara tidak langsung dapat merangsang orang beragama lain untuk mengubah cara pandang mereka terhadap warga GPM, juga terhadap kekristenan. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa selain masih ada prasangka buruk dari orang Kristen terhadap yang lain (misalnya Islam selalu dikaitkan dengan terorisme), dan orang beragama lain pun masih memiliki prasangka-prasangka buruk terhadap eksistensi agama Kristen, entah itu berkaitan dengan dogmanya maupun karakter para penganutnya.²³ Jika demikian, maka transformasi ini harusnya mampu menggugah orang beragama lain untuk berada pada satu titik pijak yang sama, sebagai wujud tanggungjawab GPM sebagai gereja yang harus menjadi contoh bagi komunitas lain di

²² Wawancara terhadap E. T. Maspaitella (Ketua Sinode GPM), 19 Januari 2022 di Ambon.

²³ Wawancara terhadap I. W. J. Hendriksz (Narasumber Komisi Permanen Ajaran Gereja GPM), 19 September 2022 di Ambon.

sekitarnya dengan cara merekonstruksi pemikiran lamanya dan mengedepankan komunikasi manusia sebagai subjek dan membangun tindakan bersama atas nama manusia.²⁴

Konsekuensi logis dari semua pemikiran di atas adalah, GPM tidak lagi memandang eksistensi agama lain dari kaca mata inklusif atau pun pluralis, melainkan lebih dari pada itu GPM mampu melampaui kemajemukan itu sendiri atau *beyond pluralism*. Kerangka *beyond pluralism* membawa GPM untuk tidak terperangkap dalam teologi masa lalunya atau teologi tradisional yang selama ini masih mendominasi, melainkan teologi yang dihasilkan dari proses GPM berindonesia itu sendiri.

Open Integrity dan Beyond Pluralism

GPM menutup pembahasannya tentang hubungan gereja dengan agama lain dan kemajemukan agama dengan dialog antar agama sebagai sebuah praksis logis yang harus dilakukan oleh GPM dan warganya. Pada artikel 517 dan 518 dijelaskan tentang cara untuk membangun hubungan antar agama di Maluku yakni dengan melakukan pemikiran ulang di dalam semua agama dan berusaha untuk memahami serta mengkritik internal masing-masing agama. Selain itu, dialog menjadi satu hal penting yang harus dilakukan untuk membangun hubungan dengan agama-agama lain. lintas agama mesti diarahkan dalam rangka memperluas penghayatan saling memahamai keyakinan iman masing-masing agama, kebangsaan dan kemanusiaan. Kebangsaan dan kemanusiaan harus menjadi inti dari dialog lintas agama, di mana kebaikan bersama bagi seluruh bangsa dan bagi kemanusiaan bersama menjadi kepedulian bersama.

Untuk mendukung semua itu, GPM mengusulkan beberapa agenda yang jelas dan konkrit, yakni hormat kepada kehidupan, menjunjung solidaritas dan keadilan, toleransi dan kebenaran, kesamaan hak dan kedudukan, Dialog dan kerja sama antar agama harus menjadi pilihan dalam menjawab secara dinamis, kreatif dan fundamental tuntutan kemajemukan agama dan dialog mesti diposisikan dalam perspektif dialog iman, kehidupan, dialog karya. Berbagai hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk merumuskan teologi agama-agama yang relevan dengan konteks bergereja GPM. Bagi saya, *beyond pluralism* atau melampaui kemajemukan merupakan rumusan teologi agama-agama yang tepat bagi GPM. Dengannya, GPM menjadikan dirinya sebagai wadah yang tidak hanya memahami dirinya sendiri dan menganggap semua agama adalah sama, melainkan memahami keberlainan serta melibatkan seluruh keberlainan itu di dalam sebuah realitas yang sama. Hal ini juga harus tercermin dalam pendekatan dialog yang diusulkan. Semua agama beserta seluruh realitasnya, tidak hanya Islam, turut terhisap di dalam proses tersebut.

Rasanya, banyak orang akan berpendapat bahwa setiap dialog yang dilakukan termasuk percakapan-percakapan lepas sehari-hari merupakan dialog antar agama yang telah dilakukan. Namun, bukan itu yang dimaksudkan sebagai dialog dalam bagian ini. Dialog yang dimaksudkan adalah dialog yang benar-benar bergerak menuju *beyond pluralism*. *Open integrity* dapat menjadi sebuah pendekatan dialog yang relevan bagi GPM dalam upayanya untuk keluar dari zona eksklusivisme, inklusivisme dan pluralis menuju *beyond pluralism* atau melampaui kemajemukan.

Open integrity merupakan sebuah pendekatan dalam dialog dengan agama lain yang bertujuan untuk mendidik diri dalam memahami satu sama lain sehingga dapat menggambarkan dirinya sendiri. Dalam pendekatan ini tidak berarti sebuah agama harus memaksa dirinya untuk menyetujui bahkan menyukai doktrin agama lain, namun memberi satu sama

²⁴ Ricardo Freedom Nanuru, *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

lain kesempatan untuk menggambarkan dirinya sendiri dan memberi ruang untuk saling memperkaya dengan memahami dirinya dalam hubungannya dengan agama dan iman yang lain itu²⁵.

Kisah-kisah di dalam Alkitab memperlihatkan Tuhan yang berdialog dalam banyak kesempatan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, untuk menjadi gereja yang hidup GPM harus melakukan dialog yang tak terbatas. Dialog yang tak terbatas artinya bahwa dialog yang tidak membatasi makna dialog itu sendiri dengan mengikuti prinsip-prinsip *open integrity*. Dialog dengan pendekatan ini membuat seseorang lebih berakar dalam imannya sendiri dengan memahami dan berhubungan dengan iman dengan orang lain²⁶

Dialog dengan pendekatan *open integrity* memiliki beberapa karakteristik, pertama, keterbukaan di mana dialog memberikan ruang bagi proses saling mengenal dan saling belajar yang mengarah pada sebuah transformasi. Kedua, batasan-batasan. Batasan diperlukan untuk menjaga dialog dapat berjalan dengan baik, sebab tanpa batas terkadang justru membawa sebuah dialog pada kekacauan. Hal ini berarti bahwa dialog yang dilakukan harus merupakan sebuah dialog kritis di mana semua agama ditantang tidak hanya mempertahankan ajaran agamanya melainkan secara bersama menyusun sebuah pesan mendalam yang terbaik bagi dialog itu sendiri. Dialog antar agama harus menjadi tanggungjawab bersama dengan kesadaran bahwa tidak ada satu agama pun yang memiliki kebenaran yang “*ready made*” tetapi “semua berada di jalan menuju kebenaran yang lebih besar.” Menurut hemat saya, pada bagian ini GPM perlu mempertimbangkan untuk menambah penjelasan yang lebih terperinci terkait dialog. Artinya bahwa dialog yang dibangun harus juga mempertimbangkan beberapa batasan. Ini tidak juga berarti dialog akan menjadi dialog yang terbatas, melainkan dialog hidup yang juga menghidupkan bukan membuka ruang untuk terjadinya konflik. Artinya bahwa dialog yang dibangun tidak membatasi makna dialog itu sendiri. Bagi orang lain mungkin hal ini adalah hal biasa yang tidak berdampak. Namun bagi saya, dengan kenyataan bahwa hingga saat ini percikan-percikan kecil di tengah masyarakat Maluku bahkan Indonesia, yakni di antara orang beragama mampu menjadi sebuah ledakan besar yang bisa saja tidak terbendung maka hal sederhana ini harus menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

Ketiga, keramahan. Ketika dialog dapat menjadi ruang untuk mengenal, memahami dan saling belajar sudah tentu akan ada singgungan-singgungan yang akan terjadi. Dengan keramahan, dialog akan dapat tetap berjalan demi melahirkan gagasan-gagasan baru bagi kehidupan bersama agama-agama, tidak hanya warga GPM yang adalah orang beragama Kristen dengan orang beragama Islam karena pengalaman konflik kemanusiaan yang pernah terjadi, tetapi dengan semua orang dalam bingkai kesetaraan sebagai warga negara Indonesia.²⁷

Bagian penting dari pendekatan dialog *open integrity* untuk menuju *beyond pluralism* adalah semua agama di Maluku bahkan di Indonesia mempunyai satu pijakan yang sama yakni meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang menciptakan dan memelihara kemajemukan termasuk realitas kemajemukan agama di Indonesia. Orang beragama yang juga orang Indonesia tidak perlu mengartikan Tuhan yang jauh dari bayangannya, sebab Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang hadir dari konteks kehidupannya. Oleh karena itu, seluruh rangkaian dialog sebagai pintu masuk ke rumah

²⁵ Philips, *Beyond Pluralism*.

²⁶ Philips.

²⁷ Philips.

bersama semua agama haruslah berangkat dari pijakan tersebut agar dapat terarah dan menutup kemungkinan untuk terjadinya singgungan-singgungan yang berakibat buruk bagi kemajemukan agama itu sendiri. Hal ini yang disebutkan Kung sebagai upaya untuk menemukan sebuah landasan yang kokoh bagi sebuah dialog yang jujur dan tidak kaku.²⁸

Dialog iman juga menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini diakui sungguh sebagai kekurangan yang harus dilengkapi oleh GPM.²⁹ Mungkin bagi sebagian orang mendialogkan iman akan berujung pada perbandingan bahkan pertikaian, namun jika dilakukan dalam keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dialog iman yang dilakukan akan murni merupakan sebuah dialog terbuka yang memberikan ruang tak terbatas untuk saling mempelajari satu dengan yang lain. Hal ini memungkinkan penerimaan dan penghargaan terhadap yang lain dapat terjadi. Karena, mengenal diri sendiri tidak dapat memberikan peluang yang besar untuk berdialog dengan baik. Sebaliknya, dialog yang terbangun akan menjadi dialog untuk kepentingan masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah agama.

Dialog *open integrity* dapat menjadi bagian dari Ajaran GPM sebagai sebuah pijakan bergereja yang relevan dengan realitas kemajemukan. Dengan dialog ini, GPM dapat menghadirkan dirinya sebagai gereja yang utuh dalam kemanusiaan, yang meletakkan semua manusia pada kesetaraan sebagai ciptaan Tuhan sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bahkan rencana yang tidak sempit makna dan dampak hanya pada satu atau dua agama, melainkan pada semua orang dan seluruh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, GPM menyediakan dialog yang saling menyuburkan atau saling mengantar kepada pendalaman pengalaman iman masing-masing. Dengan tidak meninggalkan kekhasannya, GPM membangun hubungan dengan agama lain dalam bingkai Pancasila yang memberikan penghargaan bagi kemajemukan beragama itu.

KESIMPULAN

Kemajemukan agama merupakan realitas yang tak terbantahkan, termasuk bagi GPM dalam seluruh proses memaknai proses bergereja dan berindonesia. Berbagai masalah kemajemukan agama di Maluku, bahkan Indonesia, harus menjadi tanggung jawab bersama semua agama. Memikirkan kembali bagian-bagian penting dalam rumusan ajarannya dapat menjadi langkah utama untuk merumuskan sebuah pijakan bersama dalam merawat kemajemukan agama di Indonesia. Terdapat 3 (*tiga*) hal utama yang dapat dipertimbangkan dalam usaha ini antara lain pertama, melihat Tuhan sebagai sumber kemajemukan yang juga turut bekerja dalam memelihara kemajemukan itu. Oleh karena itu, gereja tidak dapat mengabaikannya. Kedua, menjadikan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sebuah kebenaran bersama. Dengan demikian, semua orang beragama di Indonesia memiliki sebuah kesepakatan bersama tentang Sang Pencipta atau Yang Ilahi itu berdasarkan konteks Indonesia sendiri. Ketiga, menjadikan dialog dengan pendekatan *open integrity* untuk merumuskan *beyond pluralism* atau melampaui kemajemukan sebagai rumusan teologi agama-agama yang tepat bagi GPM yang harus juga tercermin dalam seluruh ajarannya. Dengan demikian, GPM sebagai lembaga keagamaan dapat mewujudkan tanggungjawabnya dalam pembentukan moral dan karakter warga gerejanya yang adalah juga orang Indonesia dalam bingkai Pancasila sebagai *common moral*.

²⁸ Muhammad Z Arifin, "Dialog Antar Agama Dalam Pandangan Hans Kung" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

²⁹ Wawancara terhadap I. W. J. Hendriksz (Narasumber Komisi Permanen Ajaran Gereja GPM), 19 September 2022 di Ambon.

REFERENSI

- Antari Swandewi, Luh Putu. "Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia." *Jurnal Jisipol* 8, no. 1 (2019): 92–108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3903959>.
- Ariarajah, Wesley. *Alkitab & Orang-Orang Yang Berkepercayaan Lain*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Arifin, Muhammad Z. "Dialog Antar Agama Dalam Pandangan Hans Kung." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila: Identitas & Modernitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Hick, John. *God Has Many Name*. Philadelphia: Westminster Press, 1982.
- Latuheru, Angel Ch., Izak Y. M. Lattu, and Tony R. Tampake. "Pancasila Sebagai Teks Dialog Lintas Agama Dalam Perspektif Hans-Georg-Gadamer Dan Hans Kung." *Jurnal Filsafat* 30 (2020).
- Muskita, Erianton. "MENGGEREJA PASCAGONFLIK MALUKU (Penelusuran Terhadap Perspektif Eklesiologi GPM Dalam Dokumen Gerejawi Dan Praksisnya Pada Periode 2005-2015)." Universitas Kristen Indonesia Maluku, 2021.
- Nanuru, Ricardo Freedom. *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Objantoro, Enggar. "Pluralisme Agama-Agama: Tantangan Bagi Teologi Kristen." *Jurnal Simpson*, 2020.
- Pardi, I Wayan. "Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan Uud 1945 Dalam Perspektif Sejarah." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 2, no. 2 (2019): 97. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15775>.
- Philips, Gerardette. *Beyond Pluralism*. Yogyakarta: Interfidei, 2013.
- Siagian, Yehezkiel. "BEYOND PLURALISM Pendekatan Open Integrity Gerardette Philips Sebagai Sebuah Upaya Dialog Pluri-Religius Dalam Berteologi Interreligius Di Indonesia." *Aradha* 1 (2021).
- Sumartana, Th. "Teologi Dan Agama-Agama." Salatiga, 1994.
- Susilawati. "Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika Bangsa Indonesia." *Jurnal Prajaiswara* 1, no. 1 (2022): 15–20. <https://media.neliti.com/media/publications/409858-application-of-pancasila-as-the-ethical-9ca822d5.pdf>.
- Titaley, John A. *Religiositas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme Dan Transformasi Agama-Agama*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013.